



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 048/Kep.573-Diskominfo/2024 TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam proses integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.359 Diskominfo/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 048/Kep.351-Diskominfo/2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2028;
- b. bahwa untuk optimalisasi arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta menyesuaikan dengan hasil reviu kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dan perubahan refensi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jabar Tahun 2024-3028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



AA63349826

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AA63349826>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);



11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 284);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov Jabar (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 41);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemprov Jabar (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.195-Org/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemprov Jabar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.573-Org/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.195-Org/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemprov Jabar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028.**



- KESATU : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.359-diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Jabar Tahun 2023-2028, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.351-Diskominfo/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.359 Diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Jabar Tahun 2023-3028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2028 yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Tahun 2024-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Arsitektur SPBE Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 048/Kep.573-Diskominfo/2024
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024-2028.

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2024-2028



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AA63349826>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemprov Jabar, menyusun Arsitektur SPBE Pemprov dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Untuk itu dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemprov Jabar dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Keselarasan dilakukan melalui penggunaan referensi arsitektur yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Selanjutnya Arsitektur SPBE Pemprov Jabar disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi dasar untuk pengambilan arah kebijakan dan strategi SPBE bagi Pemprov Jabar.

Reviu terhadap Arsitektur SPBE Pemprov Jabar dapat dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu terhadap Arsitektur SPBE Pemprov Jabar dilakukan berdasarkan:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemprov Jabar; dan
3. Perubahan pada Unsur SPBE Pemprov Jabar atau perubahan rencana strategis Pemprov Jabar untuk Arsitektur SPBE.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Arsitektur SPBE Pemprov Jabar adalah untuk mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Pemprov Jabar yang terintegrasi.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Arsitektur SPBE Pemprov Jabar memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional Layanan SPBE Pemprov Jabar yang terpadu.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemprov Jabar

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi SPBE Nasional, arah kebijakan dan strategi SPBE Pemprov Jabar melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan sumber daya manusia SPBE Pemprov Jabar.

1. Tata Kelola SPBE Pemprov Jabar

Diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE Pemprov Jabar dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE Pemprov Jabar dan kebijakan SPBE Pemprov Jabar untuk mewujudkan SPBE Pemprov Jabar yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE Pemprov Jabar, pembangunan Arsitektur SPBE Pemprov Jabar, penyederhanaan dan pengintegrasian Proses Bisnis pemerintahan di Pemprov Jabar, dan penyusunan kebijakan SPBE Pemprov Jabar yang terpadu.

Inisiatif strategis dari kegiatan Tata Kelola SPBE Pemprov Jabar dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. Penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di lingkungan Pemprov Jabar;
- b. Pembangunan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemprov Jabar; dan
- c. Penyelarasan Arsitektur SPBE Pemprov Jabar dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Pusat dan Arsitektur SPBE Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. Layanan SPBE Pemprov Jabar

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan SPBE yang terdiri dari layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemprov Jabar dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, berkesinambungan, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Inisiatif strategis dari kegiatan Layanan SPBE Pemprov Jabar berupa:

- a. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi;
- b. Membangun portal layanan publik terintegrasi, portal layanan administrasi pemerintahan terintegrasi, dan portal Ekosistem Data Jawa Barat;
- c. Penerapan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Teknologi informasi dan komunikasi yang



terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan pusat data nasional, pusat data Pemprov Jabar, jaringan intra Pemprov Jabar, jaringan intra pemerintah pusat, jaringan publik yang diamankan, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

Inisiatif strategis dari teknologi informasi dan komunikasi Pemprov Jabar berupa:

- a. penyediaan pusat data Pemprov Jabar dan terintegrasi dengan pusat data nasional;
- b. penyediaan Jaringan Intra Pemprov Jabar dan terintegrasi dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat;
- c. penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemprov Jabar dan terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat;
- d. penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di lingkungan Pemprov Jabar;
- e. pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai;
- f. pembangunan infrastruktur SPBE portal data Pemprov Jabar;
- g. pembangunan sistem keamanan informasi Pemprov Jabar; dan
- h. pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

4. Sumber Daya Manusia SPBE Pemprov Jabar

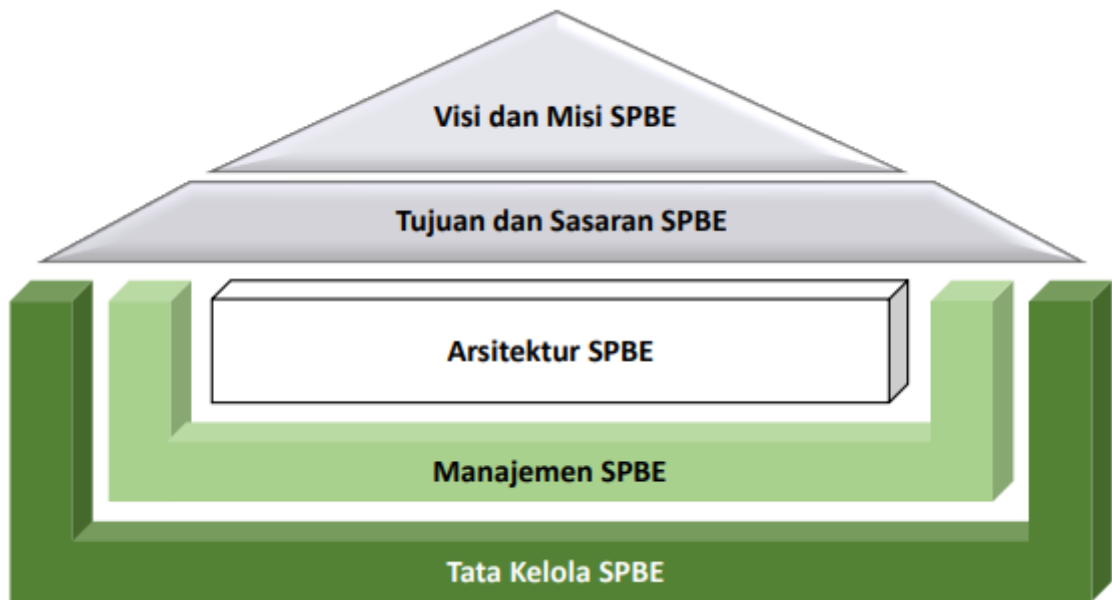
Sumber daya manusia SPBE Pemprov Jabar diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE Pemprov Jabar serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemprov Jabar. Pengembangan sumber daya manusia SPBE Pemprov Jabar dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE Pemprov Jabar, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE Pemprov Jabar, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE Pemprov Jabar berupa:

- a. Promosi literasi SPBE;
- b. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara penyelenggara SPBE di lingkungan Pemprov Jabar;
- c. Pemanfaatan forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dengan non pemerintah; dan
- d. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE Pemprov Jabar.



2.2 Kerangka Kerja SPBE Pemprov Jabar



Gambar 2.2 Kerangka Kerja SPBE

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE Nasional adalah sebagai berikut:

1. Visi SPBE Nasional

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

2. Misi SPBE Nasional

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Tujuan SPBE Nasional

Berdasarkan Visi dan Misi SPBE, Tujuan SPBE adalah:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.



4. Sasaran SPBE Nasional

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan SPBE, Sasaran SPBE adalah:

- a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

5. Tata Kelola SPBE Pemprov Jabar.

Tata Kelola SPBE Pemprov Jabar adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di lingkungan Pemprov Jabar. Tata Kelola SPBE Pemprov Jabar diterapkan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Pemprov Jabar, antara lain:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis SPBE;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

6. Manajemen SPBE Pemprov Jabar.

Manajemen SPBE Pemprov Jabar adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas di lingkungan Pemprov Jabar. Untuk menjamin kualitas dan memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen SPBE Pemprov Jabar, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

7. Arsitektur SPBE Pemprov Jabar

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

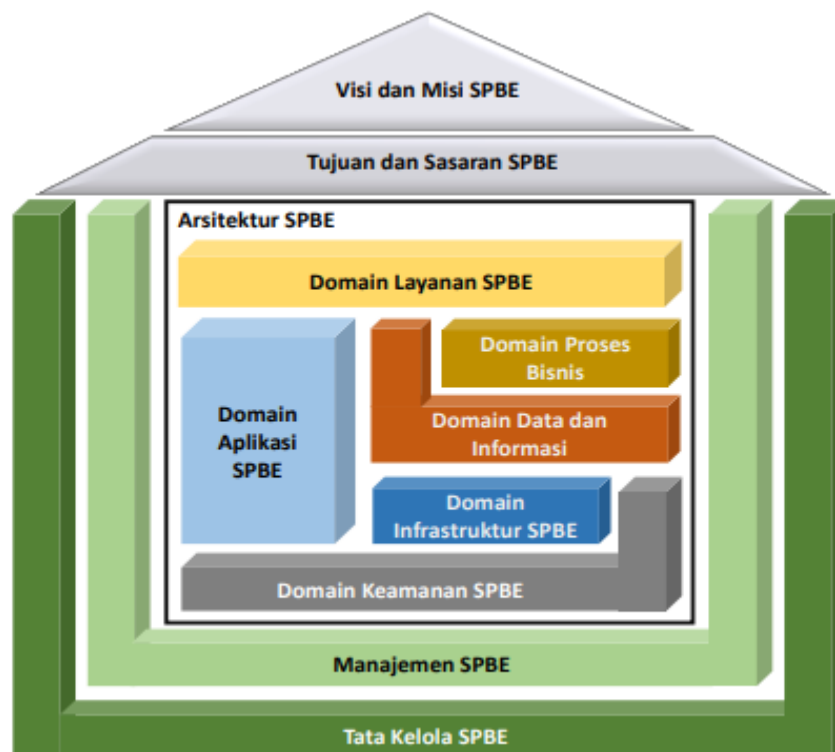
Arsitektur SPBE Pemprov Jabar disusun untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu antar Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar. Arsitektur SPBE Pemprov Jabar dijelaskan lebih rinci pada BAB V.



BAB III

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMPROV JABAR

Selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemprov Jabar memiliki pola agar dapat menghasilkan layanan digital yang terintegrasi. Pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi dan pemetaan Proses Bisnis, Data dan Informasi, serta Layanan SPBE Pemprov Jabar, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui Aplikasi SPBE Pemprov Jabar, Infrastruktur SPBE Pemprov Jabar, dan Keamanan SPBE Pemprov Jabar.



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

Arsitektur SPBE Pemprov Jabar terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Sedangkan Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Adapun referensi arsitektur SPBE terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

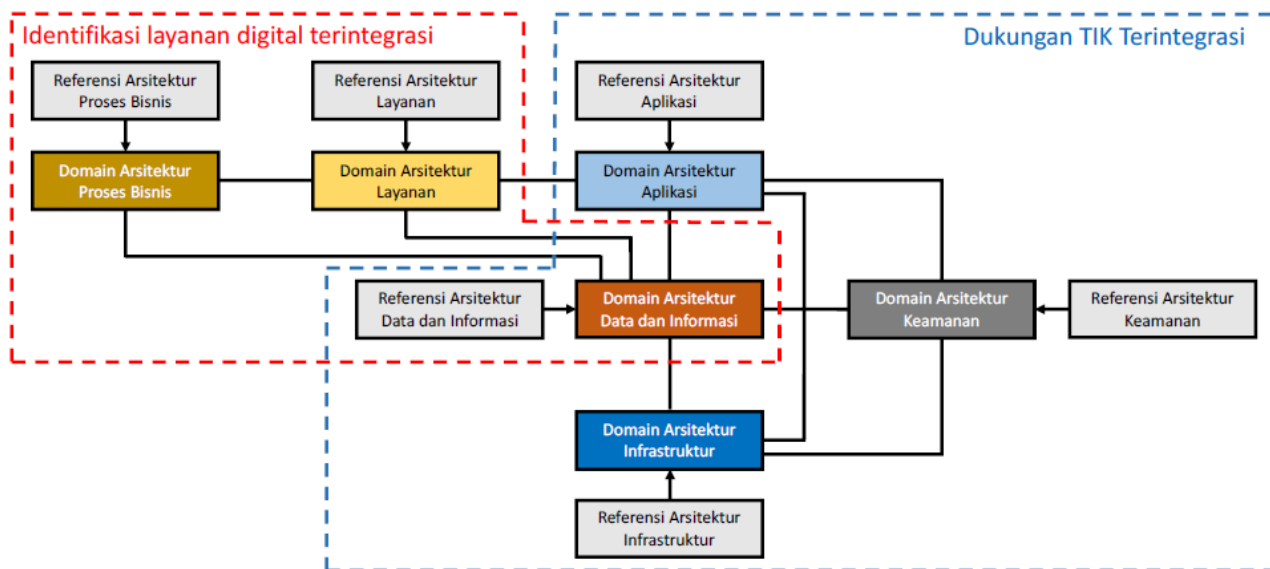
- referensi arsitektur proses bisnis;
- referensi arsitektur data dan informasi;
- referensi arsitektur layanan SPBE;
- referensi arsitektur aplikasi SPBE;
- referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- referensi arsitektur keamanan SPBE.



Sedangkan Domain Arsitektur SPBE juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 3.2. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).



Gambar 3.2 Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

3.1 Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi Perangkat Daerah berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemprov Jabar, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Pemprov Jabar dan Instansi Pusat serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat dengan Perangkat Daerah yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov

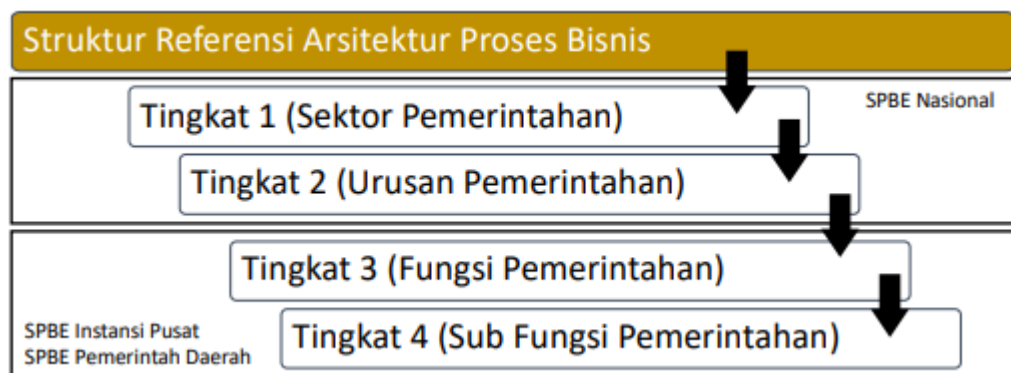


Jabar, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, dengan tidak membedakan Perangkat Daerah yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh Perangkat Daerah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Pemprov Jabar mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Pemprov Jabar menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

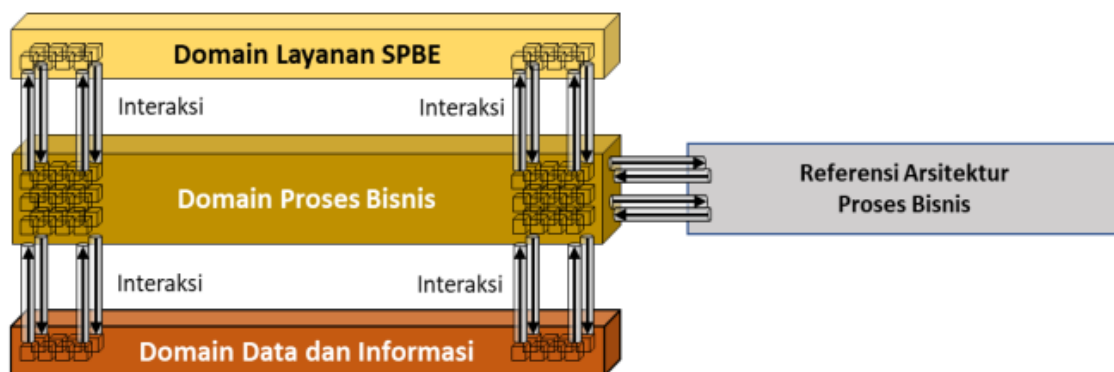


Gambar 3.3 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta mendefinisikan layanan pemerintah di lingkungan Pemprov Jabar. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.





Gambar 3.4 Relasi Langsung pada Domain Proses Bisnis

3.2 Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemprov Jabar ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan Pemprov Jabar diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di Pemprov Jabar yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemprov Jabar, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain di Jawa Barat. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

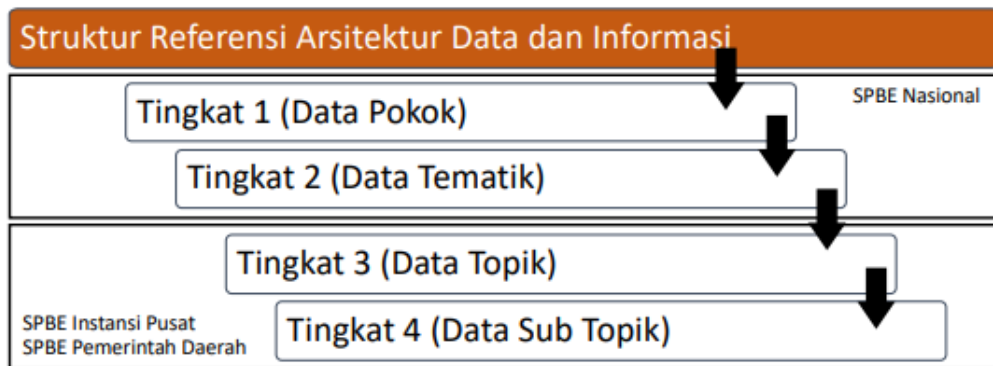
1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan di Perangkat Daerah, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;



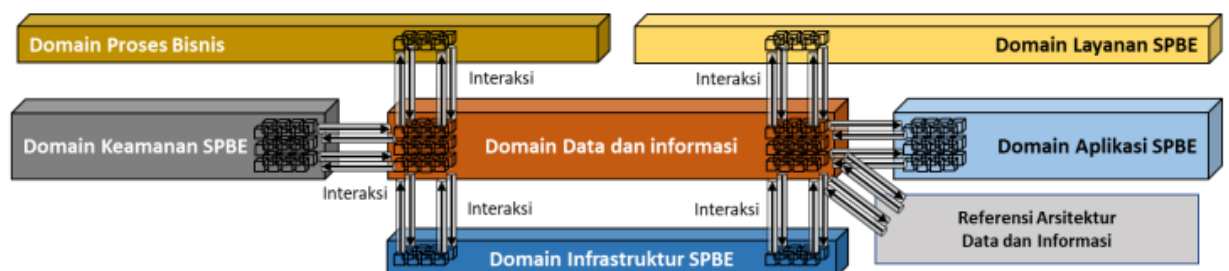
- c. data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), Pemprov Jabar mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Pemprov Jabar menyusun struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.



Gambar 3.5 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpanan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.



Gambar 3.6 Relasi Langsung pada Domain Data dan Informasi

3.3 Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, pegawai Aparatur Sipil



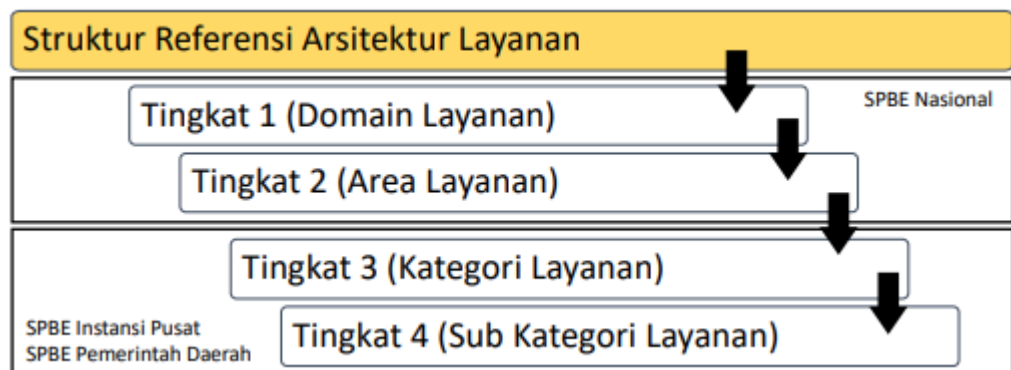
Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (*benefits*) untuk para penggunanya.

Layanan SPBE merupakan keluaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G*, *Government to Employee/G2E*).

1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan Pemprov Jabar, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemprov Jabar sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Pemprov Jabar menyusun struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

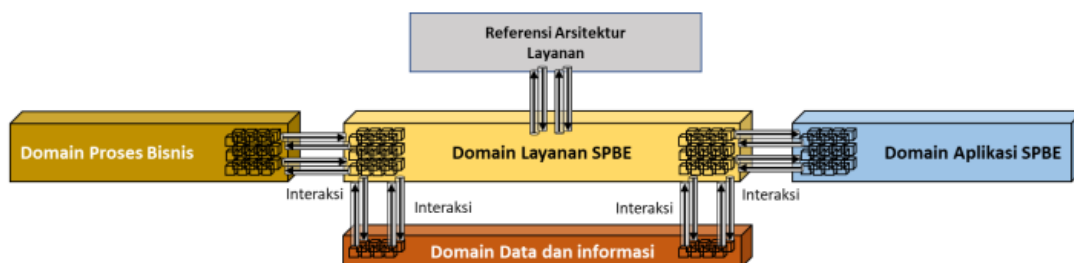


Gambar 3.7 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE



2. Keterkaitan Antar Domain

Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan oleh Pemprov Jabar, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Penghilangan duplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar unit kerja dalam Pemerintah Daerah, yang terbentuk dari domain proses bisnis, dilakukan dengan berbagi pakai aplikasi.



Gambar 3.8 Relasi Langsung pada Domain Layanan SPBE

3.4 Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE Pemprov Jabar memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/ban dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- berbasis kode sumber terbuka (*open source*); dan
- terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE.

Dalam penyusunan regulasi ini, kerangka kerja arsitektur aplikasi SPBE yang akan dijelaskan yaitu referensi arsitektur aplikasi SPBE.

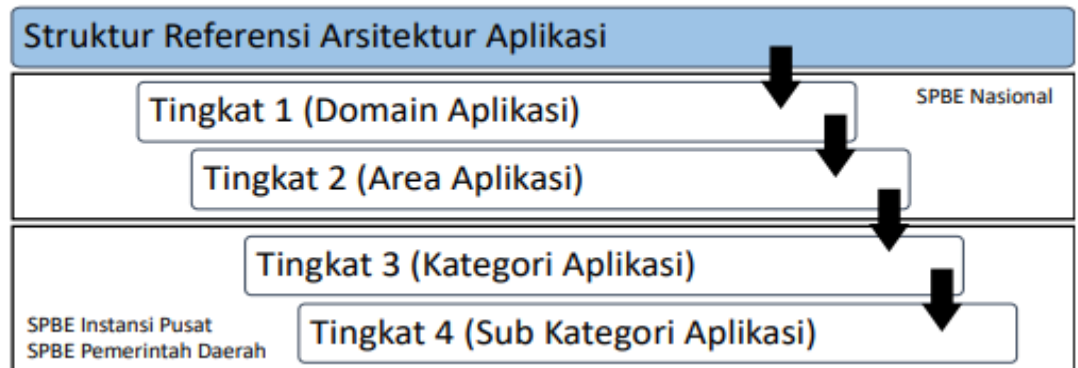
1. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;



- c. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.



Gambar 3.9 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

2. Keterkaitan Antar Domain

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.

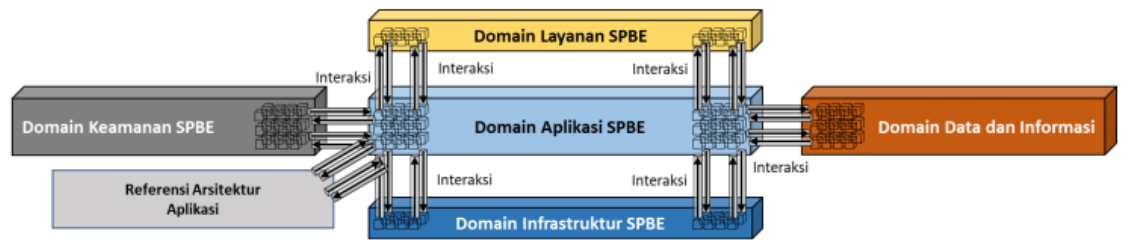
Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/bam dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (*open source*); dan



- f. terkorrelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE.



a. Gambar 3.10 Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE

3.5 Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur SPBE Pemprov Jabar, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemprov Jabar dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- pusat komputasi dan data terpusat;
- kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
- penggunaan teknologi virtualisasi;
- pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (*hardware/software/netware*) secara optimal;
- kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
- dukungan terkait media jaringan yang beragam;
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
- kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.

Dalam penyusunan regulasi ini, kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE yang akan dijelaskan yaitu referensi arsitektur infrastruktur SPBE.

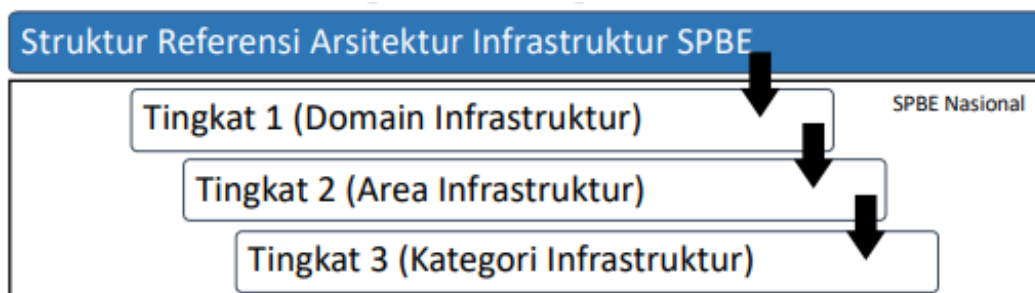
1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional. Substansi infrastruktur SPBE Pemprov Jabar diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.



Pemerintah Provinsi memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE nasional yang diperlukan.



Gambar 3.11 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.

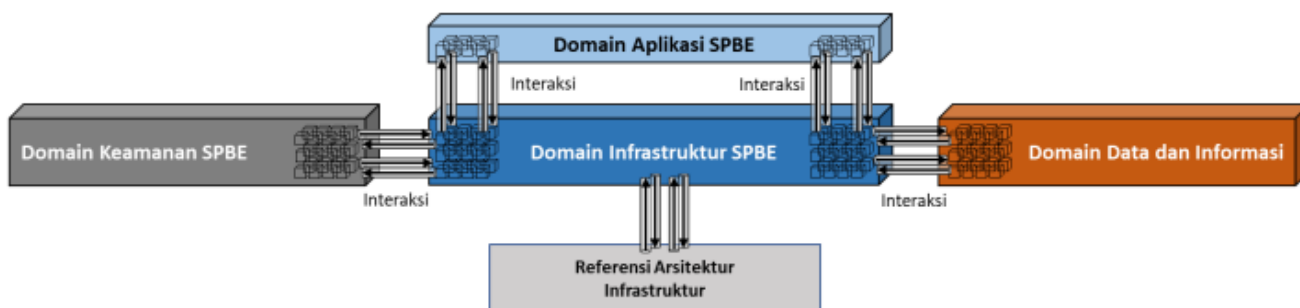
Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE;
- dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- berbasis standar umum (*open standard*); dan
- dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE.



Referensi dari struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE yang dimiliki.



Gambar 3.12 Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

3.6 Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Pemprov Jabar dan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

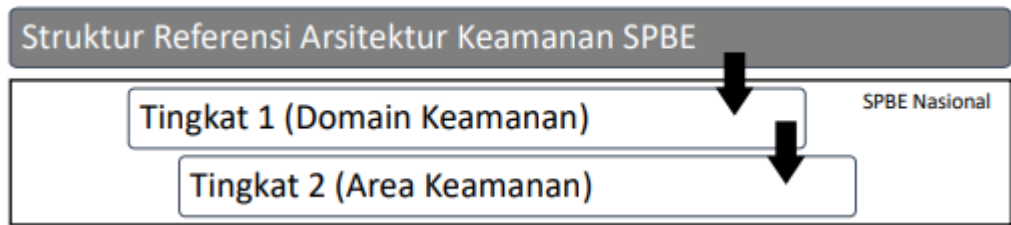
Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

1. Struktur Arsitektur Keamanan SPBE

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.





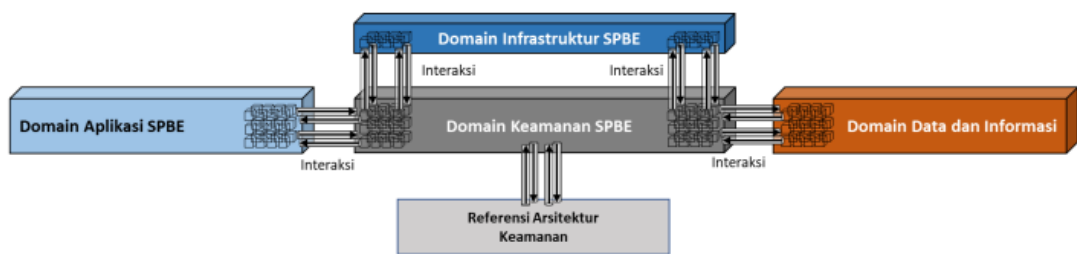
Gambar 3.13 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana SPBE di Pemerintah Daerah. Untuk penerapan keamanan SPBE, unit kerja pelaksana SPBE di Pemerintah Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.



Gambar 3.14 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE



BAB IV

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE PEMPROV JABAR

Arsitektur SPBE Pemprov Jabar seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh Pemprov Jabar, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Domain proses bisnis Pemprov Jabar memiliki struktur referensi dimana tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur referensi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) Pemprov Jabar yang merujuk pada referensi arsitektur proses bisnis nasional.

Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AA63349826>

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Pembangunan Nasional	dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariatan negara.

4.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi Pemprov Jabar memiliki struktur referensi dimana tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur referensi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) Pemprov Jabar yang merujuk pada referensi arsitektur data dan informasi nasional.

Tabel 4.2 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data	Data yang merepresentasikan bidang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AA63349826>

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

4.3.Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan SPBE Pemprov Jabar memiliki struktur referensi dimana tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur referensi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur layanan SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) Pemprov Jabar yang merujuk pada referensi arsitektur layanan SPBE nasional.



Tabel 4.3 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AA63349826>

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		lingkungan hidup.
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan dan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

4.4.Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain aplikasi SPBE Pemprov Jabar memiliki struktur referensi dimana tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur referensi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur aplikasi SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) Pemprov Jabar yang merujuk pada referensi arsitektur aplikasi SPBE nasional.

Tabel 4.4 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi	Aplikasi yang dibangun,



	Tertentu	dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

4.5.Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain infrastruktur SPBE Pemprov Jabar memiliki 3 (tiga) tingkat struktur referensi dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional.



Tabel 4.5 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.



4.6.Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Domain infrastruktur SPBE Pemprov Jabar memiliki 2 (dua) tingkat struktur referensi dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 4.6 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifkksi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.



02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan mitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan mitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi SPBE	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.



BAB V

DOMAIN ARSITEKTUR SPBE PEMPROV JABAR

Domain Arsitektur SPBE yang dideskripsikan dalam bab ini merupakan substansi Arsitektur SPBE Pemprov Jabar. Substansi arsitektur tersebut memuat seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE di keenam Domain Arsitektur SPBE. Adapun muatan domain Arsitektur SPBE Pemprov Jabar secara lebih detail dimuat dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE.

4.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis

Tabel 5.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.06	Aparatur Negara

Tabel 5.2 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

Tabel 5.3 Domain Arsitektur Proses Bisnis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

Tabel 5.4 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.06	Aparatur Negara



Tabel 5.5 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.01	Dalam Negeri
RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

Tabel 5.6 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ruang Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAB 04.02	Sosial

Tabel 5.7 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.02	Keuangan
RAB 09.03	Informasi

Tabel 5.8 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Tabel 5.9 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.01	Dalam Negeri
RAB 09.02	Keuangan

Tabel 5.10 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.06	Aparatur Negara

Tabel 5.11 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.07	Kesekretariatan Negara

Tabel 5.12 Domain Arsitektur Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.01	Dalam Negeri



Tabel 5.13 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.01	Pekerjaan Umum
RAB 03.06	Pertanahan

Tabel 5.14 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAB 07.01	Pertambangan
RAB 07.02	Energi

Tabel 5.15 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAB 07.03	Kehutanan

Tabel 5.16 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.06	Perikanan
RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAB 07.04	Kelautan



Tabel 5.17 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.01	Dalam Negeri

Tabel 5.18 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAB 04.01	Kesehatan

Tabel 5.19 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.03	Pertanian
RAB 02.05	Peternakan

Tabel 5.20 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 09	Pemerintahan Umum
RAB 09.03	Informasi
RAB 09.04	Komunikasi



Tabel 5.21 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.09	Koperasi
RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.22 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAB 07.05	Lingkungan Hidup

Tabel 5.23 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.11	Pariwisata
RAB 08	Budaya dan Agama
RAB 08.02	Kebudayaan

Tabel 5.24 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal



Tabel 5.25 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.07	Kependudukan
RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan

Tabel 5.26 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAB 06.04	Pemuda
RAB 06.05	Olahraga

Tabel 5.27 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.08	Investasi

Tabel 5.28 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAB 06.01	Pendidikan



Tabel 5.29 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.03	Transportasi

Tabel 5.30 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.01	Industri
RAB 02.02	Perdagangan

Tabel 5.31 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.03	Pertanian

Tabel 5.32 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 08	Budaya dan Agama
RAB 08.02	Kebudayaan



Tabel 5.33 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.01	Pekerjaan Umum
RAB 03.04	Perumahan
RAB 03.06	Pertanahan

Tabel 5.34 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAB 04.02	Sosial
RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan

Tabel 5.35 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.01	Pekerjaan Umum

Tabel 5.36 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 02	Ekonomi dan Industri
RAB 02.03	Pertanian



Tabel 5.37 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 03	Pembangunan Kewilayahan
RAB 03.02	Transmigrasi
RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAB 06.02	Ketenagakerjaan

Tabel 5.38 Domain Arsitektur Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan
RAB 05.02	Keamanan

4.2 Domain Arsitektur Data dan Informasi

Tabel 5.39 Domain Arsitektur Data dan Informasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.06	Data Aparatur Negara

Tabel 5.40 Domain Arsitektur Data dan Informasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.07	Data Kesekretariatan Negara



Tabel 5.41 Domain Arsitektur Data dan Informasi Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.07	Data Kesekretariatan Negara

Tabel 5.42 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.06	Data Aparatur Negara

Tabel 5.43 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.01	Data Dalam Negeri
RAD 09.07	Data Kesekretariatan Negara

Tabel 5.44 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Ruang Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAD 04.02	Data Sosial

Tabel 5.45 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat



Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.02	Data Keuangan
RAD 09.03	Data Informasi

Tabel 5.46 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAD 06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tabel 5.47 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.01	Data Dalam Negeri
RAD 09.02	Data Keuangan

Tabel 5.48 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.06	Data Aparatur Negara

Tabel 5.49 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat



Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.07	Data Kesekretariatan Negara

Tabel 5.50 Domain Arsitektur Data dan Informasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.01	Data Dalam Negeri

Tabel 5.51 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.01	Data Pekerjaan Umum
RAD 03.06	Data Pertanahan

Tabel 5.52 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAD 07.01	Data Pertambangan
RAD 07.02	Data Energi

Tabel 5.53 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat



Kode	Referensi Arsitektur
RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAD 07.03	Data Kehutanan

Tabel 5.54 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.06	Data Perikanan
RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAD 07.04	Data Kelautan

Tabel 5.55 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.01	Data Dalam Negeri

Tabel 5.56 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAD 04.01	Data Kesehatan



Tabel 5.57 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.03	Data Pertanian
RAD 02.05	Data Peternakan

Tabel 5.58 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum
RAD 09.03	Data Informasi
RAD 09.04	Data Komunikasi

Tabel 5.59 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.09	Data Koperasi
RAD 02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.60 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
RAD 07.05	Data Lingkungan Hidup



Tabel 5.61 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.11	Data Pariwisata
RAD 08	Informasi Budaya dan Agama
RAD 08.02	Data Kebudayaan

Tabel 5.62 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal

Tabel 5.63 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.07	Data Kependudukan
RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAD 04.03	Data Pemberdayaan Perempuan

Tabel 5.64 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAD 06.04	Data Pemuda



Kode	Referensi Arsitektur
RAD 06.05	Data Olahraga

Tabel 5.65 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.08	Data Investasi

Tabel 5.66 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAD 06.01	Data Pendidikan

Tabel 5.67 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.03	Data Transportasi

Tabel 5.68 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.01	Data Industri
RAD 02.02	Data Perdagangan



Tabel 5.69 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.03	Data Pertanian

Tabel 5.70 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 08	Informasi Budaya dan Agama
RAD 08.02	Data Kebudayaan

Tabel 5.71 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Perumahan dan
Permukiman Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.01	Data Pekerjaan Umum
RAD 03.04	Data Perumahan
RAD 03.06	Data Pertanahan

Tabel 5.72 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Sosial Daerah
Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan
RAD 04.02	Data Sosial
RAD 04.03	Data Pemberdayaan Perempuan



Tabel 5.73 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Sumber Daya
Air Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.01	Data Pekerjaan Umum

Tabel 5.74 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri
RAD 02.03	Data Pertanian

Tabel 5.75 Domain Arsitektur Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 03	Informasi Pembangunan Kewilayahan
RAD 03.02	Data Transmigrasi
RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja
RAD 06.02	Data Ketenagakerjaan

Tabel 5.76 Domain Arsitektur Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan
RAD 05.02	Data Keamanan



4.3 Domain Arsitektur Layanan SPBE

Tabel 5.77 Domain Arsitektur Layanan SPBE Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.04	Ekonomi
RAL 01.11	Badan Usaha Milik Negara
RAL 01.26	Sosial
RAL 01.28	Hukum
RAL 01.30	Hak Asasi Manusia
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.01	Dalam Negeri
RAL 02.02	Keuangan
RAL 02.04	Aparatur Negara
RAL 02.06	Dukungan Operasional Organisasi
RAL 02.07	Akuntabilitas Kinerja
RAL 02.08	Organisasi dan Tata Kelola
RAL 02.09	Data dan Informasi Pemerintahan

Tabel 5.78 Domain Arsitektur Layanan SPBE Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.06	Dukungan Operasional Organisasi



Tabel 5.79 Domain Arsitektur Layanan SPBE Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.04	Aparatur Negara

Tabel 5.80 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.04	Aparatur Negara

Tabel 5.81 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.01	Dalam Negeri

Tabel 5.82 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ruang Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.26	Sosial

Tabel 5.83 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.02	Keuangan



Tabel 5.84 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.33	Pengetahuan dan Teknologi

Tabel 5.85 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.02	Keuangan

Tabel 5.86 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.04	Aparatur Negara

Tabel 5.87 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.06	Dukungan Operasional Organisasi

Tabel 5.88 Domain Arsitektur Layanan SPBE Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional



Tabel 5.89 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.17	Pekerjaan Umum
RAL 01.22	Pertanahan

Tabel 5.90 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.36	Pertambangan
RAL 01.37	Energi

Tabel 5.91 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.38	Kehutanan

Tabel 5.92 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.10	Perikanan
RAL 01.39	Kelautan



Tabel 5.93 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.01	Dalam Negeri

Tabel 5.94 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.25	Kesehatan

Tabel 5.95 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.07	Pertanian
RAL 01.09	Peternakan

Tabel 5.96 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.43	Informasi
RAL 01.44	Komunikasi
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.09	Data dan Informasi Pemerintahan



Tabel 5.97 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.13	Koperasi
RAL 01.14	Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.98 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.40	Lingkungan Hidup

Tabel 5.99 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.15	Pariwisata
RAL 01.42	Kebudayaan

Tabel 5.100 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal



Tabel 5.101 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.23	Kependudukan
RAL 01.27	Pemberdayaan Perempuan

Tabel 5.102 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.34	Pemuda
RAL 01.34	Olahraga

Tabel 5.103 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.12	Investasi

Tabel 5.104 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.31	Pendidikan



Tabel 5.105 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.19	Transportasi

Tabel 5.106 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.05	Industri
RAL 01.06	Perdagangan

Tabel 5.107 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.08	Perkebunan

Tabel 5.108 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.42	Kebudayaan
RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan
RAL 02.04	Aparatur Negara



Tabel 5.109 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.20	Perumahan

Tabel 5.110 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.26	Sosial

Tabel 5.111 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.17	Pekerjaan Umum

Tabel 5.112 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.07	Pertanian



Tabel 5.113 Domain Arsitektur Layanan SPBE Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.18	Transmigrasi
RAL 01.32	Ketenagakerjaan

Tabel 5.114 Domain Arsitektur Layanan SPBE Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Kode	Referensi Arsitektur
RAL 01	Layanan Publik
RAL 01.29	Keamanan

4.4 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 5.115 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE Pemprov Jabar

Kode	Referensi Arsitektur
RAA 01	Aplikasi Umum
RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik
RAA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan
RAA 02	Aplikasi Khusus
RAA 02.01	Aplikasi Misi Tertentu
RAA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu



4.5 Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tabel 5.116 Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemprov Jabar

Kode	Referensi Arsitektur
RAI 01	Fasilitas Komputasi
RAI 01.01	Pusat Data Nasional
RAI 01.02	Pusat Komputasi
RAI 01.03	Pusat Kendali
RAI 02	Sistem Integrasi
RAI 02.01	Jaringan Intra Pemerintah
RAI 02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
RAI 03	Platform
RAI 03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
RAI 03.02	Komputasi Awan

4.6 Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel 5.117 Domain Arsitektur Keamanan SPBE Pemprov Jabar

Kode	Referensi Arsitektur
RAK 01	Standar Keamanan
RAK 01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
RAK 01.02	Standar Keamanan Internasional
RAK 01.03	Regulasi Lainnya
RAK 02	Penerapan Keamanan
RAK 02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
RAK 02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
RAK 02.03	Peningkatan Keamanan SPBE
RAK 02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE




Kode	Referensi Arsitektur
RAK 02.05	Audit Keamanan SPBE
RAK 03	Kelaikan Keamanan
RAK 03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum
RAK 03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

BAB VI
PENUTUP

Arsitektur SPBE Pemprov Jabar ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemprov Jabar.

Dengan adanya penyelarasan antara Arsitektur SPBE Pemprov Jabar dengan Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur Kabupaten/Kota, diharapkan tercipta sinergi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si. Pembina Utama
---	--



AA63349826